

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju membangun desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena adanya banyak faktor yang mempengaruhi pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan secara nasional, karena merupakan struktur pemerintah yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan lebih merata serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat dan memperhatikan semua unsur nilai dan adat istiadat setempat. Pemerintah dan kabupaten/kota memiliki kewajiban pertimbangan keuangan yang harus diberikan kepada desa yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).<sup>1</sup>

Pembangunan pedesaan berperan penting dan strategis didalam pembangunan nasional dan daerah, karena mengandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya serta menyentuh secara langsung.

---

<sup>1</sup>Dyah Mutiarin, "Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pembangunan Desa dikabupaten Bulungan tahun 2011-2014," *Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 3 (2015 ) hlm., 560.

Sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pembangunan desa merupakan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU ini disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, bantuan keuangan dari APBD, hibah, sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan pendapatan yang sah.

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintah terkecil yang dipimpin oleh kepala desa dari sebuah pemilihan secara langsung, sehingga desa dapat dikatakan sebagai entitas yang penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berlandaskan keadilan, nilai-nilai budaya, dan agama. Masyarakat desa dalam usaha mewujudkan tata kelola keuangan desa yang aspiratif dan partisipatif, bersih, keterbukaan dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pengaturan dengan peraturan daerah tentang keuangan desa. Internal control dilakukan oleh internal perangkat desa yang sebagai entitas desa.<sup>2</sup> Internal control dilakukan untuk memastikan bahwa hal-hal yang sudah dianggarkan benar-benar sudah di kerjakan oleh entitas desa. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tujuan operasional entitas desa dapat tercapai sesuai dengan tujuan awal.

Kontrol internal atau internal control dalam organisasi merupakan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan oleh entitas untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data

---

<sup>2</sup>I Nyoman Judarmita And Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Sistem Pelaporan Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *E - Jurnal Akuntabilitas Universitas Udayana* 21, no. 3 (Desember 2017): hlm,1721.

akuntansi, meningkatkan koefisien operasional dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan menajerial yang ditetapkan.<sup>3</sup> Berdasarkan definisi tersebut, pemerintah desa dalam menjalankan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) harus sesuai dengan kebijakan pemerintahan, sehingga diperlukan internal kontrol untuk memastikan yang dikerjakan oleh entitas desa sesuai dengan standar operasional keuangan desa atau kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Mengacu pada pekerjaan yang dijalankan oleh pemerintah desa, diperlukan Pelaksanaan pengendalian internal dalam menjalankan pekerjaan pemerintah desa dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pelaksanaan Pengendalian Internal merupakan sebuah proses yang dilaksanakan oleh struktur penting dalam organisasi dalam hal ini pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, aparat desa, komite dan tokoh masyarakat yang dilakukan untuk memberikan keyakinan tentang tercapainya keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi kegiatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Pemerintah desa dalam memastikan kegiatan operasional dalam hal ini APBDes memerlukan pengendalian internal yang dijalankan oleh internal kontrol dan dilakukan oleh komite desa.

Pemerintah desa dituntut untuk menjalankan program kerjanya termasuk dalam merancang dan merealisasikan APBDes harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Standar atau tolak ukur APBDes yang baik antara lain:

---

<sup>3</sup>Laurence B sawyer, Mortimer A Dittenhofer, and James H Scheiner, *Audit Internal Sawyer's*, 5th ed. (Selemba Empat, 2005), hlm 57.

<sup>4</sup>Sugianto and Indra iman sumantri, "Peran Audit Internal Dan Sistem Pengendalian Internal Atas Pegajian Kredit Tanpa Angunan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 13, no. 2 (Oktober 2019): hlm,202.

1. Disusun dan ditetapkan tepat waktu;
2. Materi yang disusun sinkron atau berkesesuaian dengan produk perencanaan lainnya; produk perencanaan desa, produk perencanaan kabupaten dan produk perencanaan pemerintah provinsi dan pusat;
3. Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan proses partisipasi masyarakat secara masif dan nyata melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
4. Kegiatan yang telah ditetapkan betul-betul sesuai kebutuhan untuk mengatasi permasalahan, upaya meningkatkan kualitas pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Kegiatan yang telah ditetapkan secara penganggaran sesuai dengan ketentuan standar belanja barang dan jasa pemerintah, sesuai dengan ketentuan pagu anggaran dan sesuai ketentuan pengaturan pengelompokan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
6. Kegiatan yang telah ditetapkan memiliki nilai-nilai inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong penguatan sosial ekonomi masyarakat berkelanjutan.

Sehingga dalam objek penelitian yaitu di Desa Nyalabu Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang memiliki tiga kampung yaitu Kampung Barat, Kampung Tengah, Dan Kampung Timur. Desa Nyalabuh Laok merupakan salah satu desa pinggiran kota dan selama beberapa tahun telah memperoleh APBDes untuk proyek desa, sehingga banyak tuntutan dari masyarakat untuk meningkatkan transparansinya. Oleh sebab itu pada awal tahun 2018 mulai

diterapkan sebuah sistem aplikasi SISKUEDES ( Aplikasi Sistem Keuangan Desa) yang dapat mengakses dan melaporkan beberapa anggaran dan realisasi dari APBDes. selain itu kegiatan APBDes dituntut untuk dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku dan diterima umum, sehingga dibutuhkan sistem pengendalian internal untuk memastikan hal tersebut dapat berjalan seperti biasa.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, dapat menarik minat penulis untuk melakukan penelitian terhadap yang berjudul: “Pelaksanaan Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Nyalabuh Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Periode 2018.”

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Nyalabuh Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana efektifitas pengendalian internal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Nyalabuh Laok kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Nyalabuh Laok kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui efektifitas pengendalian internal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Nyalabuh Laok kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai kegunaan sebagai berikut:

### **1. Secara Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan sekaligus menjadi bahan referensi yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan yang luas dalam dunia pengetahuan, serta memberikan bukti empiris tentang Pelaksanaan pengendalian internal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Nyalabuh Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dan disamping itu sebagai rekomendasi bagi pelaksana kegiatan penelitian dibidang yang sama di masa yang akan datang.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media untuk mempertajam daya kritis dan nalar kecerdasan.

#### **b. Bagi Lembaga Almamater (IAIN Madura)**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap khazanah *literatur* perpustakaan pada bidang Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Madura Pamekasan.

#### **c. Bagi mahasiswa Akuntansi Syariah**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan bacaan yang dapat memperluas wawasan pengetahuan khususnya dalam masalah fungsi pengendalian internal di pemerintahan desa.

#### **d. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang aktual dan menjadi kontribusi yang efektif dalam pembangunan ekonomi

masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya melalui keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah dimaksudkan untuk mencapai persepsi dan pemahaman yang serasi tentang penelitian dan menghindari kesalah pahaman tentang maksud dari judul penelitian ini. Beberapa istilah (definisi) yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan pengendalian Internal: merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari berbagai kebijakan, prosedur, teknik, peralatan fisik, dokumentasi dan manusia. Selain itu meliputi kebijakan dan tindakan yang diambil dalam suatu organisasi untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan perusahaan tercapai.<sup>5</sup>
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui secara Bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang atas Pendapatan belanja dan Pembiayaan.
3. Desa: Pemerintah terkecil, terdepan, terbawah dan terdekat dengan Masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan defisini yang dipaparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pengendalian internal dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

---

<sup>5</sup>widiya Tamodia, *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Untuk Persediaan Barang Dagang Pada PT Laris Manis Utama Cabang Manado (Jurnal EMBA, n.d.)*, hlm 22.

<sup>6</sup> Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa (Bandung: fokus media, 2015)*, hlm. 55.

(APBDes) merupakan suatu cara dalam tujuan organisasi yang terdiri atas berbagai kebijakan, prosedur, teknik, peralatan fisik, dokumentasi dan manusia Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian Penelitian terdahulu pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahmani dan Fatimah dengan judul Analisis sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bengkalis dalam perspektif islam studi kasus pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bengkali dan memiliki latar belakang bahwa Otonomi Daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi keuangan yang transparan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat meminimalisir terjadinya kecurangan/kesalahan baik dalam pencatatan maupun penyajian laporan keuangan yang dibuktikan dengan adanya pemantauan terhadap pencatatan akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa sesuai dengan yang diinginkan dan bisa dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>
2. Penelitian yang dilakukan Widya Tamodia dengan judul Evaluasi penerapan sistem pengendalian intern untuk persediaan barang dagangan pada pt. Laris manis utama cabang manado memiliki latar belakang Persediaan adalah salah satu aktiva penting yang dimiliki oleh perusahaan,

---

<sup>7</sup> Sri Rahmani and Fatimah, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupateen Bengkalis Dalam Persepektif Islam" 4, no. 1 (June 2020): 110–23.



karena persediaan merupakan suatu aktiva maka harus dilakukan pengendalian intern yang baik untuk menjaga persediaan tersebut dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Sistem pengendalian intern persediaan barang bertujuan untuk mengendalikan dan mengelola persediaan barang. Tujuan utama dari pengendalian atas persediaan adalah mengamankan persediaan dan melaporkannya secara tepat dalam laporan keuangan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yaitu, analisis deskriptif. Dari hasil penelitian pada PT. Laris Manis Utama Cabang Manado merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang distributor buah import, atau lebih dikenal sebagai penjual buah import grosir dan eceran. Evaluasi sistem, pengendalian intern atas persediaan sudah efektif, dimana adanya pemisahan tugas antara fungsi – fungsi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran barang. Pemantauan terhadap persediaan barang dagangan juga dilakukan secara rutin setiap sebulan sekali oleh bagian gudang melalui kegiatan stock opname. Sistem pengendalian persediaan barang dagangan pada PT. Laris Manis Utama Cabang Manado berjalan dengan baik.<sup>8</sup>

3. Arif Widyatama, Lola Novita dan Diarespati dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki latar belakang penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, Sejauh mana

---

<sup>8</sup> widya Tamodia, “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Untuk Persediaan Barang Dagang Pada Pt Laris Manis Utama Cabang Manado,” *Jurna EMBA* 1, no. 3 (n.d.): 20–29.

Penerapan Faktor Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan Accountability Framework dan untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi aparatur pemerintah dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini menggunakan explanatory research, tempat penelitian di Kabupaten Sigi dengan jumlah sampel sebanyak 61 sampel dengan menggunakan random sampling. Teknik analisis yang digunakan Regresi Linear Berganda, uji hipotesis menggunakan taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  dengan bantuan program SPSS versi 16,00. Uji validitas dengan teknik corrected item-total correlation dengan syarat minimum  $r = 0,3$ . Uji reliabilitas dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan batas koefisien  $\alpha > 0,6$ . Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan variabel Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD, sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Widya Tamodia	Evaluasi penerapan sistem pengendalian intern untuk persediaan barang dagangan	Sama-sama menggunakan variabel sistem pengendalian internal. Sama-sama ingin melakukan kontrol audit terhadap	Objek penelitian pada penelitian terdahulu memilih menggunakan perusahaan yang bergerak dalam distributor buah

<sup>9</sup> Arif Widyatama, Lola Novita, and Diarapati, “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD),” *Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 2, no. 2 (n.d.): 1–20.

		pada PT laris manis utama cabang Manado	pelaporan atas kegiatan yang dikerjakan.	impor. Selain itu tujuan penelitian widya yaitu untuk mengamankan persediaan dan melaputkan secara tepat dalam laporan keuangan berbeda dengan penelitian skripsi ini yaitu untuk menganalisis sistem pengendalian internal dalam APBDes Nyalabuh Laok. <sup>10</sup>
2	Sri Rahmani dan Fatimah	Analisis pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bangkalis dalam persepektif islam	Sama-sama menggunakan variabel sistem pengendalian internal. Sama-sama ingin mengungkap peleporan entis pemerintah.	Penelitian ini memilih objekpemerintah desa sedangkan peneliti Sri Rahmani dan Fatimah memilih pemerintah kabupaten. <sup>11</sup>
3	Arif Widyatama, Lola Novita dan Diarespati	Pengaruh kompetensi dan sisitem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola	Sama-sama membahas tentang pemerintah desa. Sama-sama menggunakan variabel sistem pengendalian internal dan sama-sama bertujuan untuk	Penelitian ini menggunakan variabel APBDes berbeda dengan penelitain yang dilakukan oleh arif widyatama yang memiliki fokus pengungkapan

<sup>10</sup>widya Tamodia, "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Untuk Persediaan Barang Dagang Pada Pt Laris Manis Utama Cabang Manado," *Jurna EMBA* 1, no. 3 (n.d.): 20–29.

<sup>11</sup>Sri Rahmani and Fatimah, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupateen Bengkalis Dalam Persepektif Islam" 4, no. 1 (June 2020): 110–23.

		alokasi dana desa (ADD)	mengungkap pelaporan pemerintah desa.	sistem pengendalian internal pada ADD. <sup>12</sup>
--	--	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------------------

Sumber data dikelola.

---

<sup>12</sup>Arif Widyatama, Lola Novita, and Diarespati, "Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)," *Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 2, no. 2 (n.d.): 1–20.